

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan organisasi akan terus dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang cukup rumit. Organisasi laba dan non laba harus mengikuti peraturan yang sesuai karena memiliki tingkat kompleksitas yang serupa (Fitriani et al., 2022). Dengan adanya peraturan atau regulasi membuat seluruh kegiatan suatu organisasi dapat beroperasi dengan efektif dan efisien. Salah satu organisasi non laba yang harus memiliki peraturan ialah taman kanak-kanak. Peraturan tersebut ditulis untuk menjadi acuan terhadap kegiatan operasional pada taman kanak-kanak.

Berdasarkan Permendikbud No. 146 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1, PAUD dikelompokkan berdasarkan rentang usia yang berbeda-beda. Fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyediakan layanan berdasarkan rentang usia anak. Tempat Penitipan Anak (TPA) melayani anak berusia 0 hingga 2 tahun, Kelompok Bermain (KB) melayani anak usia 2 hingga 4 tahun, dan Taman Kanak-kanak (TK) melayani anak usia 4 hingga 6 tahun. PAUD berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan fase usianya, sedangkan TK secara khusus memberikan stimulasi untuk mendukung berbagai aspek perkembangan anak usia 4 hingga 6 tahun. TK merupakan salah satu bentuk pendidikan formal yang dirancang untuk anak usia dini dalam rangka mengembangkan berbagai potensi dan kemampuannya (Dista, 2020). TK harus memiliki peraturan

atau regulasi yang jelas agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu peraturan yang ada yaitu peraturan yang mengatur keuangan TK. Dalam rangka menjalankan kegiatan operasional tentunya memerlukan peraturan mengenai keuangan yang baik sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan di TK masih belum berjalan dengan baik, dikutip dari laman kumparan.com, terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Kepala Sekolah TK di Lumajang. Menurut informasi dari Kepala Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Lumajang, pihaknya berhasil menyita uang sejumlah Rp157 juta yang merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut belum sempat digunakan untuk dibayarkan kepada CV buku tertentu. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita di Desa Kaburan serta Ketua Kelompok Kerja Kepala TK Kunir diduga telah menerima sejumlah komisi terkait dengan pengadaan buku dan alat peraga edukatif untuk TK-TK di wilayah Lumajang. Namun, menurut penjelasan Wakil Bupati Lumajang, Indah Masdar, seharusnya kewajiban pembelian buku merupakan wewenang pihak TK, bukan Dinas Pendidikan. Ia menegaskan bahwa adanya pemberian buku oleh Dinas Pendidikan disertai permintaan 25% dari dana tersebut dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan keuangan, karena seharusnya TK yang berwenang melakukan pembelian buku secara mandiri. Hal ini menunjukkan penyelewengan yang terjadi mengenai pengelolaan keuangan di TK masih marak terjadi. Penyelewengan dapat terjadi jika pengelolaan keuangannya tidak berjalan dengan baik. Selain

itu, kontrol, pengendalian, dan pengawasan dari pihak yang berwenang sangatlah penting untuk keberlangsungan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dimuat di [nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com), terdapat 59 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan 130 tersangka pada 2023. Pengadaan dan anggaran sarana prasarana sekolah masih menjadi sasaran empuk untuk tindakan korupsi di sektor ini. Menurut ICW, jenis-jenis korupsi yang terjadi di sektor pendidikan mencakup penyalahgunaan anggaran dari berbagai program, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bantuan sosial, dana bantuan bagi mahasiswa, serta Program Indonesia Pintar (PIP).

Hasil survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih maraknya kasus korupsi di sektor pendidikan. Pertama, dari segi karakter, sikap integritas siswa cenderung masih parsial dan belum terintegrasi secara holistik dalam lingkungan lembaga pendidikan. Kedua, pada aspek ekosistem, kondisi lingkungan belum memadai secara kondusif untuk mendorong penegakan nilai-nilai integritas, misalnya kurangnya keteladanan dari pendidik, seperti ketidakdisiplinan dalam waktu mengajar, adanya kecurangan akademik, serta praktik pendidikan bayangan (*shadow education*). Ketiga, dalam dimensi tata kelola, perilaku koruptif masih menjadi permasalahan serius, yang ditandai dengan adanya praktik-praktik yang telah dianggap biasa, meliputi pemberian hadiah tak resmi, tarif tak resmi, penyalahgunaan wewenang dalam

pengadaan barang/jasa, pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga dalam penerimaan peserta didik baru, laporan keuangan yang direkayasa, serta pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang kurang transparan. Kerumitan sistem pendidikan dan rendahnya tingkat transparansi dalam pengelolaan pendidikan menjadi faktor-faktor yang mendukung maraknya kasus korupsi di sektor pendidikan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan pada TK tentunya terdiri dari beberapa sistem yang saling berhubungan dengan prosedur yang sesuai. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan, sistem akuntansi pada TK terbagi menjadi beberapa prosedur diantaranya prosedur penerimaan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP), langkah-langkah penerimaan uang tunai operasional, panduan pengeluaran kas operasional, mekanisme penggajian dan penerimaan siswa, dll (Maulana et al., 2024).

Pembuatan Standar Operasional Prosedur pada TK bertujuan agar pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu, penyajian informasi dan pembuatan laporan keuangan menjadi semakin mudah dilakukan berkat adanya sistem dan prosedur yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi sebagai panduan atau referensi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat untuk menilai kinerja. Kinerja tersebut ditentukan oleh indikator teknis, administratif, dan prosedural yang disesuaikan dengan metode, proses kerja, serta sistem unit kerja yang terkait. Penerapan SOP dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu organisasi mengatasi tantangan berikut ini: (1)

Peningkatan tingkat kompleksitas dalam operasional organisasi yang juga diiringi dengan risiko kesalahan atau penyimpangan. (2) Organisasi harus memenuhi lebih banyak persyaratan hukum dan regulasi. (3) Tuntutan kualitas produk yang konsisten dari pelanggan yang semakin kritis akan meningkat (Nikmah & Pratama, 2023).

Berdasarkan sifat kegiatannya, SOP dibagi menjadi dua yaitu SOP administratif dan SOP teknis. SOP administratif adalah dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan yang tidak mencantumkan prosedur kegiatannya secara terperinci. Sedangkan SOP teknis berupa dokumen prosedur pelaksanaan kegiatan yang memuat cara pelaksanaan prosedur kegiatan secara urut, lengkap, dan detail. Salah satu contoh SOP teknis yaitu SOP penerimaan dan pengeluaran kas pada TK.

Prosedur Standar Operasional (SOP) penerimaan kas merupakan serangkaian langkah-langkah pencatatan yang dirancang untuk mengelola penerimaan uang dari berbagai sumber, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat serta disetujui oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sementara itu, SOP pengeluaran kas adalah prosedur pencatatan yang dibuat untuk mencatat setiap pengeluaran suatu organisasi yang menyebabkan pengurangan aset berupa kas, bank, atau setara kas lainnya, dengan disertai bukti-bukti yang konkret serta otorisasi dari pihak yang berwenang, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Penggunaan SOP pada taman kanak-kanak dapat mengontrol seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas agar terhindar dari penyelewengan,

pencurian, dan kecurangan. Oleh karena itu, SOP harus dimiliki oleh suatu organisasi tak terkecuali pada TK. Semakin baik SOP yang berlaku, semakin efektif pengelolaan arus kas, baik penerimaan maupun pengeluarannya, maka informasi keuangan yang dihasilkan akan semakin dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Fitriani et al., 2022).

Berdasarkan wawancara pada tahap pra riset yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengurus di TK Islam Al-Kautsar II Pondok Gede, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada TK Islam Al-Kautsar II yaitu pengelolaan keuangan TK masih menggunakan cash atau uang tunai. Menurut penuturan bendahara, TK Islam Al-Kautsar II belum memiliki rekening sekolah sehingga seluruh penerimaan dan pengeluarannya masih dalam bentuk tunai. Hal ini dikhawatirkan menjadi penghambat dalam pengelolaan dana TK. Padahal penggunaan rekening sekolah bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pengurus TK. Selain itu, pengelolaan keuangan TK menggunakan rekening bank juga mampu memberikan efisiensi administrasi keuangan.

Selain itu, permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan TK yaitu pada belum adanya prosedur atau SOP khusus untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan pengeluaran kas bagi suatu organisasi merupakan proses penting untuk keberlangsungan hidup organisasi tersebut. apabila suatu organisasi tidak memiliki SOP mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dikhawatirkan akan menimbulkan beberapa masalah diantaranya ketidakjelasan prosedur yang mengakibatkan kesalahan pada

langkah yang diambil ketika sedang terjadi masalah, risiko penyelewengan dan kecurangan menjadi lebih tinggi karena terdapat celah untuk melakukannya, dan ketidakakuratan pada proses pencatatan transaksi pada pembukuan mungkin saja terjadi akibat tidak adanya prosedur yang tetap.

Permasalahan lainnya menurut penuturan dari bendahara yaitu belum adanya laporan keuangan. Bendahara melakukan pengelolaan pemasukan kas untuk bagian penerimaan uang SPP hanya dicatat pada buku besar dan tidak sesuai sistematika akuntansi. Kemudian untuk pengelolaan pengeluaran kas hanya menyimpan bukti nota dan tidak melakukan pencatatan dengan baik. Hal ini membuat bendahara kesulitan membuat laporan keuangan.

Permasalahan lainnya pada kajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Istiqomah et al. (2023) bahwa pencatatan kas keluar masih dilakukan secara manual, sedangkan pencatatan akuntansinya sudah diproses secara komputerisasi menggunakan Ms. Excel yang diakibatkan SOP belum dibuat yang mengakibatkan beberapa pegawai kurang konsisten dalam melaporkan bukti transaksi. Hal ini berdampak terhadap pembuatan laporan keuangan yang menjadi terhambat. Mulani & Hafni (2023), penerapan SIA penerimaan kas pada layanan rawat inap belum efektif. Masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang, serta kurangnya pembagian fungsi dan tanggung jawab yang memadai. Lebih lanjut, implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang masih bersifat manual dan belum dijalankan sesuai tahapan yang semestinya dapat memicu terjadinya kecurangan dalam pengelolaan kas dan penyalahgunaan kewenangan pada masing-masing unit.

Mustika & Amaliah (2021), prosedur penerimaan kas pada SMK Maritim belum tersistem dengan baik dan pencatatannya masih menggunakan buku kas. Selain itu, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas belum sesuai dengan standar akuntansi, seperti tidak adanya fungsi pemeriksaan internal terhadap saldo kas dan uang hasil penerimaan kas tidak langsung disetor ke bank melainkan menunggu arahan dari kepala sekolah.

Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu lebih menekankan pada evaluasi proses penerimaan dan pengeluaran kas serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan suatu usulan sistem informasi akuntansi yang mencakup prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Pembuatan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada taman kanak-kanak diharapkan dapat membantu mengelola keuangan operasional agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam penelitian yang berjudul **“PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KAUTSAR II PONDOK GEDE”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Bertolak dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memuat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi untuk penerimaan



dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Islam Al-Kautsar II Pondok Gede saat ini?

2. Bagaimana usulan implementasi SOP (Standar Operasional Prosedur) atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Islam Al-Kautsar II Pondok Gede?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Islam Al-Kautsar II Pondok Gede.
2. Menyusun suatu usulan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Islam Al-Kautsar II Pondok Gede.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat, baik teoretis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teori yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi nirlaba berdasarkan teori *Committee of Sponsoring*

*Organizations (COSO).*

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa berkaitan dengan penyajian Standar Operational Prosedur (SOP) penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi nirlaba berdasarkan teori *Committee of Sponsoring Organizations (COSO).*

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi pengurus TK Islam Al-Kautsar II Pondok Gede yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber panduan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas. SOP yang diusulkan oleh peneliti diharapkan mampu berjalan dengan efektif dan efisien sehingga proses penerimaan dan pengeluaran kas menjadi lebih baik. Diharapkan SOP penerimaan dan pengeluaran kas bisa digunakan dengan baik oleh pengurus TK Islam Al-Kautsar II Pondok Gede.